

# Perkoperasian Membangun Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Sunarto NDARU MURSITO\*

Dalam pembangunan nasional dewasa ini pembangunan ekonomi dijadikan ujung tombak untuk menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Supaya kesejahteraan setiap warga bangsa ini betul-betul tercapai, memang dituntut agar pembangunan dapat menciptakan pertumbuhan dan pemerataan. Bagi negara yang masih terbelakang dan mengalami pertumbuhan penduduk yang besar seperti negara kita, proses pertumbuhan dan pemerataan adalah sama-sama penting. Sebab tanpa pertumbuhan ekonomi, maka taraf hidup penduduk akan semakin merosot. Dan tanpa pemerataan ekonomi berarti negara menanggung kepincangan sosial, karena golongan ekonomi kuat pasti lebih cepat berkembang daripada golongan ekonomi lemah.

Menghadapi kenyataan demikian itu telah ditemukan suatu sistem ekonomi yaitu bangun usaha koperasi, yang pada prinsipnya mampu untuk menumbuhkan ekonomi rakyat kecil dan semakin memeratakan ekonomi masyarakat. Sudah barang tentu usaha koperasi baru mempunyai pengaruh besar atas pertumbuhan dan pemerataan, apabila sistem koperasi dibudayakan sampai menjangkau berbagai sektor kehidupan ekonomi nasional. Selama koperasi hanya menggapai bidang kecil saja dari wilayah ekonomi yang begitu besar, jelaslah daya guna koperasi hampir tak berarti dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Maka memang wajarlah, jika bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap peranan koperasi untuk membangun kesejahteraannya. Ini terungkap dalam amanat Konstitusi UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Perundang-undangan Nasional, dan penugasan Kepemerintahan. Dengan ini bangun usaha koperasi sudah diyakini dan dipilih sebagai sistem ekonomi nasional yang dipandang mampu memroseskan pertumbuhan dan pemerataan

\*Staf CSIS.

ekonomi bangsa, terutama ekonomi bangsa di daerah pedesaan yang pada umumnya masih tergolong ekonomi lemah. Sebab itu tidak ada pilihan lain kecuali: pemerintah dan rakyat Indonesia hendaknya secara konsekuen bekerja keras untuk membina keberhasilan koperasi dan membudayakan koperasi yang berhasil itu.

### UNIT-UNIT KOPERASI: SUMBER DAYA PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat dianut adanya prinsip: "mencari pendapatan semaksimal mungkin dengan pengeluaran ongkos tertentu." Prinsip ini dipegang teguh oleh para pelaku ekonomi, supaya usaha ekonominya terus-menerus meningkat. Untuk itu pelaku ekonomi menggunakan perhitungan yang saksama dan selengkap-lengkapnyanya demi membuat rencana serta pelaksanaan usaha yang matang dan efektif. Usaha ekonomi yang terjadi dalam masyarakat ini tak terhindari berlangsung dalam persaingan di antara berbagai pelaku ekonomi.

Dalam persaingan ini orang berupaya untuk memenangkan usaha ekonominya, dan baru merasa aman bila dapat mengalahkan atau meninggalkan usaha saingannya. Justru kadang-kadang perkembangan para saingan dianggap sebagai bahaya bagi kemajuan usahanya sendiri. Memang dalam ekonomi masyarakat yang bersaing ini dituntut pula adanya kerja sama dari berbagai usaha. Namun atas dasar prinsip ekonomi di atas, kerjasama usaha ini diterima serta digiatkan apabila bisa menguntungkan kemajuan usahanya itu, dan tidak diinginkan lagi kerjasama apabila sudah tidak memberi manfaat.

Demikianlah kondisi yang terjadi, jikalau usaha ekonomi hanya dimotori oleh cita-cita mencari pendapatan setinggi-tingginya: yaitu konkritnya berupa keuntungan uang yang sebanyak-banyaknya. Padahal dalam proses ekonomi masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang, yang kesemuanya ingin hidup, maju, dan bisa menentukan perolehan hasil-hasil dari pembangunan masyarakat. Dari persaingan mencari keuntungan secara adu kuat itu, akibatnya sebagian masyarakat kalah bersaing dan terpaksa menderita posisi lemah dalam "daya menawar" (bargaining power).

Menghadapi golongan ekonomi kuat jelas bagian masyarakat yang berkecukupan ekonomi lemah tidak/kurang berdaya. Justru di antara masyarakat ekonomi lemah sendiri masing-masing saling bersaing untuk mengambil manfaat dari ekonomi masyarakat. Namun mereka hanya akan dilibatkan dalam ekonomi masyarakat, sejauh memberi manfaat/keuntungan pada kelangsungan atau perkembangan pihak ekonomi kuat. Jadi secara kasarnya, mereka tergantung dan diperalat semata-mata.

Guna menyeimbangkan perkembangan ekonomi masyarakat, bangsa Indonesia menyadari pentingnya dikembangkan sistem ekonomi kerjasama di antara bagian masyarakat ekonomi lemah yaitu sistem usaha koperasi. Di dalam sistem koperasi usaha/kehidupan ekonomi golongan lemah yang kecil-kecil dipersatukan, supaya saling membantu serta menguatkan dan dengan demikian mampu berkembang secara bersama-sama.

Bagaimanapun usaha ekonomi mempersyaratkan adanya modal dan jiwa wiraswasta. Dua faktor inilah merupakan kekurangan menyolok pada masyarakat ekonomi lemah di negara-negara yang masih terbelakang. Karena kemajuan ekonomi menuntut adanya modal dan jiwa wiraswasta, maka untuk membangun ekonomi masyarakat kita yang lemah pun perlu dikembangkan permodalan dan kewiraswastaan. Pengembangan dua faktor inilah merupakan tantangan koperasi di Indonesia.

Kewiraswastaan dan permodalan ini sebagai syarat mutlak yang harus terus-menerus ditumbuhkan, agar usaha koperasi bisa secara mantap mengangkat kaum ekonomi lemah dari kemiskinannya. Pengembangan yang tidak seimbang antara dua faktor tersebut pasti tak memungkinkan koperasi menyejahterakan anggota-anggotanya. Pemupukan modal yang belum diimbangi pembinaan kewiraswastaan anggotanya, mudah membuat kekayaan koperasi di-selewengkan oleh pengurusnya atau badan koperasi diperalat untuk kepentingan pihak luar. Sebaliknya pembinaan kewiraswastaan tanpa dibarengi pemupukan modal, hanya menghasilkan koperasi yang terbatas kemampuannya dan bahkan kerdil usahanya. Di sini kewiraswastaan dimaksudkan pendidikan jiwa wiraswasta pada semua orang yang terlibat dalam koperasi, sebab mereka yang membentuk koperasi dan bertanggung jawab untuk perkembangannya.

Melalui koperasi niscaya penyatuan sumber daya ekonomi yang kecil-kecil dapat dihimpun kekuatan (modal) yang jauh lebih besar. Bila mereka secara sendiri-sendiri lemah dalam pasar ekonomi yang bersaing, maka dalam penggalangan koperasi terbangun suatu kemampuan ekonomi yang jauh lebih kuat. Akibatnya, di dalam koperasi orang-orang ekonomi lemah dapat mengkombinasikan modal mereka menjadi kesatuan yang jauh lebih besar dan para anggota secara bersama-sama lebih digalakkan untuk saling mendidikkan jiwa wiraswasta. Secara demikian, mereka kurang dipermainkan atau didikte senaknya oleh golongan ekonomi kuat dalam memperebutkan hasil-hasil pembangunan.

Dengan sistem koperasi, rakyat kita yang berekonomi lemah pada dasarnya dapat menjual hasil produksinya dengan harga lebih tinggi dan membeli sarana-sarana produksi maupun kebutuhan konsumsinya dengan harga lebih murah. Selain itu penjualan dan pembelian dalam koperasi ini bisa mendapat-

kan kemudahan tertentu. Terutama dengan berkoperasi dapat dilatih dan digalakkan jiwa ekonomi/wiraswasta mereka: tahu memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan, bersemangat hemat dan menabung, keinginan berinvestasi, berpikiran jauh ke hari depan, dan mau menghargai waktu. Lagi pula sistem koperasi tidak memupuk jiwa ekonomi egois, melainkan jiwa ekonomi sosial: yaitu memupuk semangat persatuan (keakraban), gotong-royong, diskusi-musyawarah, demokratis, menghormati sesama warga masyarakat, menginginkan kesejahteraan umum.

Sebaliknya koperasi-koperasi pun merupakan wadah yang menampilkan sasaran yang jelas untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dari pihak pemerintah. Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpendapatan rendah dengan mudah menyalurkan pembinaan dan bantuannya kepada koperasi yang berdisposisi memungkinkan perkembangan mereka. Begitu pula pihak-pihak swasta, cendekiawan, atau warga masyarakat yang mau mengamalkan nasionalisme atau patriotisme untuk peningkatan kesejahteraan sesama warga bangsanya yang lebih lemah, mendapatkan medan yang subur guna perkembangan kesejahteraan itu.

Dalam perekonomian Indonesia yang amat besar wilayah dan sangat luas sektor-sektornya, memang dibutuhkan pembentukan unit-unit koperasi yang sebanyak-banyaknya. Mengenai besarnya setiap unit koperasi disesuaikan dengan efisiensi dan efektivitas optimalnya guna pengembangan kesejahteraan penduduk setempat. Karena wewenang pembangunan koperasi secara nasional berada pada satu departemen yaitu Departemen Koperasi dan instansi bawahannya, maka sebenarnya jaringan-kerjasama yang saling membantu antara setiap koperasi akan lebih mudah dilakukan. Misalnya kerjasama antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau koperasi jasa, kerjasama antara koperasi pertanian dan koperasi peternakan atau koperasi industri. Sebagai akibatnya, kerjasama yang serentak dan perkembangan bersama dari seluruh koperasi ini akan terus-menerus menumbuhkan kekuatan ekonomi masyarakat lemah dan semakin berdaya mampu memeratakan hasil-hasil pembangunan masyarakat.

Akhirnya pentinglah disadari, bahwa sistem perkoperasian dapat menyumbang banyak untuk kesejahteraan umum. Pengelolaan jaringan ekonomi secara koperasi lebih menjamin penyediaan, pengadaan, distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan bahkan untuk semakin meningkatkannya dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga lebih dimungkinkan terciptanya stabilisasi dan perimbangan harga-harga dari barang atau jasa itu. Perkoperasian yang terus-menerus menaikkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan sekaligus "mewajarkan" (mengurangi/mengadilkan) keuntungan masyarakat ekonomi kuat, berakibat semakin memeratakan kekayaan masyarakat. Lalu bersamaan dengan corak koperasi yang menanam-

kan semangat demokrasi atau musyawarah, niscaya pengembangan koperasi dalam ekonomi masyarakat/nasional menjadi penggerak demokratisasi ekonomi dan partisipasinya ke segenap warga negara.

### PROSPEK PEMBANGUNAN KOPERASI DI PEDESAAN

Sistem usaha koperasi di negara kita telah mengalami sejarah perkembangan panjang yang kurang menggembirakan. Sebab ternyata selama puluhan tahun hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan koperasi betul-betul berhasil menyejahterakan para anggotanya. Sedangkan sebagian terbesar koperasi bagaikan usaha kerdil, tidak sempat tumbuh, memperoleh nama jelek/tak dipercaya, atau bangkrut dan tinggal papan nama saja. Bahkan sampai sekarang masih terlekat citra yang kurang baik terhadap nama koperasi, yaitu dipandang seakan-akan badan sosial atau badan usaha yang lebih menguntungkan para pengurus daripada anggotanya. Atau juga dikesankan sebagai badan usaha yang diperalat oleh oknum-oknum petualang ekonomi untuk memanipulasi fasilitas guna kepentingan mereka sendiri.

Kendatipun perkembangan koperasi di negara kita berlumuran citra kurang baik, namun masih tetap teguh diyakini bahwa perkoperasian adalah sistem usaha yang cocok dan tangguh untuk melindungi dan mengembangkan masyarakat ekonomi lemah. Masyarakat ekonomi lemah ini terutama meluas di daerah pedesaan dan semakin tertinggal akibat telah berlangsungnya kesenjangan yang cenderung membesar antara kemajuan ekonomi perkotaan dan ekonomi pedesaan. Perekonomian lemah ini pada umumnya diderita lapisan masyarakat petani gurem: petani dengan luas tanah garapan tak memadai untuk nafkah yaitu luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar. Menurut Sensus Penduduk tahun 1980 di Indonesia terdapat 17.408.560 rumah tangga petani. Dari jumlah ini hanya 6.440.907 rumah tangga (37%) memiliki tanah garapan melebihi 0,5 hektar dan selebihnya 11.027.653 rumah tangga (63%) memiliki tanah garapan kurang dari 0,5 hektar.<sup>1</sup>

Karena pertumbuhan penduduk yang masih besar, maka kondisi lemah ekonomi di pedesaan dikhawatirkan tidak semakin berkurang. Diketahui bahwa selama tahun 1973-1980 jumlah petani di Indonesia meningkat dari sekitar 14 juta menjadi sekitar 17 juta orang, atau bertambah rata-rata 2,8% setahun. Dari jumlah ini yang tergolong petani gurem meningkat dari sekitar 6,6 juta menjadi sekitar 11 juta orang atau bertambah rata-rata 9,52% setahun. Sedangkan dalam periode ini jumlah petani penggarap yang tak bertani dan menjadi buruh tani meningkat dari sekitar 0,49 juta menjadi se-

<sup>1</sup>Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Penduduk 1980*, hal. 32-35.

kitar 2 juta orang, atau bertambah rata-rata 44,02% setahun.<sup>1</sup> Jadi dari petani pedesaan yang tergolong masyarakat ekonomi sangat lemah ada sekitar 13 juta orang, dan jika mereka ini dalam keluarganya rata-rata menghidupi 5 orang, maka berarti ada 65 juta penduduk petani miskin di pedesaan. Jumlah masyarakat ekonomi lemah ini akan meningkat lagi kalau ditambah dengan penduduk ekonomi lemah dari sektor perdagangan, buruh industri, dan sektor jasa.

Untuk memberantas kemiskinan itu, pemerintah dan bangsa Indonesia melancarkan berbagai program untuk meningkatkan produksi kaum miskin yaitu dengan pembangunan irigasi, perhubungan, bimbingan pertanian/peternakan, industri kecil, perkreditan, transmigrasi, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Peningkatan berbagai sektor produksi ini pasti sukar terwujud, apabila tidak ditunjang oleh pembangunan bidang pemasaran, distribusi, permodalan, dan kewiraswastaan penduduk miskin pedesaan setempat. Sebab itu memang tak kalah serius dan mendesaknya upaya menangani pengembangan perkoperasian untuk membina bidang pemasaran, distribusi, permodalan, dan kewiraswastaan secara mantap dan terus meningkat.

Supaya perkembangan ekonomi pedesaan dipacu sehingga tidak semakin tertinggal dalam pembangunan nasional, maka pemerintah menempuh sistem pembangunan ekonomi BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan KUD (Koperasi Unit Desa). Agar di pedesaan dapat berkembang suatu koperasi sebagai badan usaha yang bermanfaat dan terandalkan, khususnya pendirian KUD dipersiapkan melalui rintisan BUUD. Yaitu dari BUUD yang tak diragukan lagi pertumbuhan usaha dan kemampuannya menyejahterakan masyarakat desa, siap untuk ditingkatkan menjadi KUD. Dengan ini BUUD dibina mencapai badan usaha yang kukuh dan memadai untuk menjadi KUD yang dapat berkembang mantap dan sekaligus menghapus citra keliru bahwa koperasi tak mampu meningkatkan taraf hidup.

Apabila koperasi diharapkan menjadi wahana yang menumbuhkan ekonomi masyarakat lemah dan pemeratakan hasil-hasil pembangunan masyarakat, jelaslah koperasi harus dibina menjadi bangun usaha ekonomi yang sehat sehingga mampu berkembang. Dari koperasi yang sehat perkembangannya ini akan tampil bobot koperasi yang disegani sebagai partner usaha bagi pihak usaha swasta atau perusahaan negara. Upaya pembangunan perkoperasian di tanah air ini menjadi unit-unit usaha ekonomi yang kuat, mulai terasa hasilnya adalah semenjak Pelita III, setelah pemerintah lebih aktif mengembangkan perkoperasian melalui lembaga Menteri Muda.

<sup>1</sup>Prof.Dr. Ace Partadireja dalam harian *Kompas*, 11 Pebruari 1983 dan Menteri Transmigrasi/Ketua Umum HKTI, Martono dalam harian *Suara Karya*, 2 Mei 1983.

Data perkembangan koperasi itu terlihat dari peningkatan jumlah koperasi: dari 17.430 dalam tahun 1978 menjadi 23.325 pada tahun 1982 atau naik 33,82%. Dari jumlah ini terdapat 5.911 KUD yang meningkat 33% dari jumlah pada tahun 1978. Jumlah anggota koperasi meningkat dari 7,6 juta dalam tahun 1978 menjadi 11 juta pada tahun 1982 atau meningkat 46,40%. Sedangkan volume usaha meningkat dari Rp 162,8 milyar dalam tahun 1978 menjadi Rp 2.093,3 milyar (lebih dari 2 trilyun) pada tahun 1982 atau merupakan lonjakan 1.185,7%. Permodalan koperasi meningkat dari Rp 92,9 milyar dalam tahun 1978 menjadi Rp 595,4 milyar atau naik 444%. Tabungan koperasi meningkat dari Rp 20,07 milyar dalam tahun 1978 menjadi Rp 90,60 milyar pada tahun 1982 atau meningkat 351,32%.<sup>1</sup>

Perkembangan perkoperasian yang maju pesat dalam Pelita III di suatu propinsi dapat diberi contoh Sumatera Selatan. Jumlah koperasi/KUD di propinsi ini dalam tahun 1979 adalah 428 dan telah berkembang menjadi 810 pada tahun 1983, atau rata-rata kenaikan 17% setahun. Jumlah anggota dalam tahun 1979 adalah 67.009 orang menjadi 233.294 orang pada tahun 1983, atau rata-rata kenaikan 49% setahun. Jumlah simpanan dari Rp 207,38 juta dalam tahun 1979 menjadi Rp 1.985,44 juta pada tahun 1983 atau rata-rata kenaikan 171% setahun. Volume usaha dari Rp 2.185,92 juta dalam tahun 1979 menjadi Rp 18.276,16 juta pada tahun 1983. Sisa hasil usaha dari Rp 85,84 juta dalam tahun 1979 menjadi Rp 451,73 juta pada tahun 1983.<sup>2</sup>

Secara khusus mengenai koperasi unit desa (KUD) dapat dilihat kemajuan KUD di Kabupaten Kediri. Kabupaten ini memiliki 30 KUD. Dari kesemuanya itu yang paling terbelakang mempunyai sisa hasil usaha (SHU) setahunnya Rp 10 juta. Misalnya KUD Nugroho Purwosari dalam tahun 1981 mempunyai SHU Rp 50 juta dan pada tahun 1982 SHU meningkat menjadi Rp 80 juta lebih. Padahal empat tahun yang lalu yang dihasilkan kebanyakan koperasi ini hanya hutang saja. Adapun jumlah anggota KUD meningkat 350% per tahunnya, meskipun demikian jumlah anggota seluruh KUD baru 36.500 orang dari 285.239 KK penduduk Kabupaten Kediri.<sup>3</sup>

Kendatipun koperasi di tanah air kita sudah berhasil dibangkitkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang mampu berkembang, namun sampai kini peranan koperasi dalam ekonomi nasional masih sangat kecil. Menurut Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Prof.Ir. Soedarsono Hadisapoetro, perkoperasian baru mengambil bagian 5% dari perekonomian nasional, sementara peranan selebihnya dipegang oleh perusahaan negara dan perusahaan

<sup>1</sup>Diolah dari tabel *Business News*, 15 Juli 1983.

<sup>2</sup>Berita *Antara*, 11 Mei 1984.

<sup>3</sup>Harian *Suara Karya*, 24 dan 25 Pebruari 1983.

swasta.<sup>1</sup> Angka ini sudah merupakan kemajuan bila dibandingkan dengan data dari tahun 1979, di mana menurut Prof. Dr. Mubyarto sektor perusahaan negara menguasai 12%, sektor koperasi 2%, dan sektor swasta 86% dari perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Dengan potensi perkembangan itu citra negatif yang masih dilekatkan pada koperasi tentulah bisa semakin dihapuskan, sebagaimana gambaran buruk mengenai perusahaan negara dan usaha swasta pun dapat menghilang. Seperti dahulu perusahaan negara dipikirkan sebagai sarang korupsi dan salah urus atau usaha swasta sebagai usaha spekulasi dan manipulasi serta penghisap tenaga/uang rakyat. Dengan dibentuknya Departemen Koperasi dalam Pelita IV ini jelas pemerintah bertekad untuk membangun perkoperasian secara terus-menerus dan bahkan lebih intensif lagi. Pembangunan koperasi dimaksudkan supaya lebih berdaya guna semakin mengembangkan ekonomi masyarakat lemah, sehingga segenap warga negara secepatnya mampu lepas landas dalam pembangunan nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi 15.426 orang karyawan Departemen Koperasi sekarang ini, yaitu menarik dan menggiatkan partisipasi masyarakat guna memantapkan dan meluaskan koperasi sebagai sarana meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan.

Apabila selama empat tahun Pelita III volume usaha koperasi di Indonesia dapat meningkat hampir tiga belas kali, maka dalam Pelita IV yang lebih intensif membangun perkoperasian seharusnya volume usaha koperasi dilipatgandakan dari sekitar Rp 2 trilyun itu setidaknya-tidaknya menjadi lebih dari Rp 26 trilyun pada akhir Pelita IV. Negara kita dapat mencontoh pembangunan perkoperasian di negara-negara maju yang dalam sejarahnya bahkan berekonomi kapitalis-liberal, namun ternyata berhasil mengembangkan perkoperasian menjadi kekuatan besar di samping kekuatan ekonomi lainnya.

Contoh keberhasilan koperasi di negara maju tersebut seperti di Finlandia 40% perdagangan eceran diselenggarakan oleh koperasi, di Norwegia dan Swedia 20% pertokoan adalah milik koperasi, dan di Belanda 60% produksi pertaniannya dijual melalui koperasi. Malahan di Denmark 80% kepala keluarga merupakan anggota koperasi. Sementara itu di Inggris koperasi konsumsi mampu melayani 25% dari kebutuhan penduduknya, sedangkan di Amerika Serikat koperasi pertanian menguasai 40% perdagangan padi-padian dan 98% listrik pedesaan diselenggarakan oleh koperasi. Kemudian di Jerman Barat bank koperasi dapat berkembang pesat, sehingga di seluruh Jerman dilayani 9.500 buah kantornya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Berita Antara, 16 Desember 1983.

<sup>2</sup>Harian Kompas, 9 Juli 1983.

<sup>3</sup>Harian AB, 20 Juli 1984.



## PENGARAHAN MEMANTAPKAN DAN MELUASKAN PERKEMBANGAN KOPERASI

Proses berkembangnya perkoperasian di pedesaan kita jelaslah ditentukan oleh sehatnya usaha dari tiap-tiap unit koperasi sendiri dan oleh semangat saling menunjang di antara sesama unit koperasi atau dengan sektor usaha lain. Karena masih begitu lemahnya pertumbuhan perkoperasian desa pada umumnya, maka demi terlaksananya kedua hal keadaan itu sudah pasti dituntut ketekunan pembinaan, yang antara lain menyangkut program pendidikan perkoperasian pada anggota, pendayagunaan pengawasan intern dan ekstern, pemupukan modal yang terus-menerus, penciptaan iklim yang membantu, perluasan usaha dari koperasi yang berkembang, dan kemampuan koperasi bekerjasama dengan sektor usaha yang lain.

### Pendidikan Perkoperasian pada Anggota

Setiap pendirian suatu unit koperasi sudah seharusnya mengutamakan program pendidikan koperasi yang sistematis bagi semua orang yang dilibatkan usaha berkoperasi itu. Pertama-tama perlu dilakukan penerangan mengenai arti dan faedah koperasi seluas-luasnya, kemudian ditanamkan kesadaran maupun kedisiplinan berkoperasi pada semua anggota koperasi. Ini semua hasilnya akan tercermin dalam penunaian hak/kewajiban dan wujud bobot rapat-rapat anggota yang suaranya bermutu atau berbakat kreatif. Hal demikian kiranya masih kurang terdapat pada koperasi-koperasi yang sukar berkembang, seperti yang diberitakan bahwa 80% KUD di Jawa Tengah masih dalam keadaan tidak sehat.<sup>1</sup> Demi kemajuan koperasinya sewajarnya para anggota koperasi diajak belajar dari seluk-beluk koperasi-koperasi yang sudah berhasil baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendidikan perkoperasian yang terus-menerus ini akan memungkinkan hidup dan berkembangnya koperasi sebagai prestasi gerakan rakyat dan bukan hanya buatan pemerintah.

Pendidikan secara intensif pada orang-orang yang ditugasi mengelola koperasi adalah faktor sangat penting. Para pengurus koperasi seharusnya diajarkan mengenai cara-cara mengelola perusahaan, sehingga dari antara mereka terbina naluri-naluri bisnis. Begitu pula hendaknya diajarkan tentang seluk-beluk pembukuan. Sebaiknya orang-orang yang diangkat menjadi badan pemeriksa keuangan koperasi adalah orang yang pernah sukses dalam kepengurusan koperasi atau setidaknya menimba pengalaman dari koperasi yang sudah berhasil. Pemberian bonus yang menarik di luar gaji bulanan dan yang tinggi-rendahnya disesuaikan dengan keuntungan koperasi, niscaya merangsang para pengelola koperasi bekerja secara maksimal untuk perkembangan koperasinya.

<sup>1</sup>Harian *Sinar Harapan*, 9 Desember 1983.

Supaya koperasi semakin bermanfaat untuk kepentingan anggota dan langganannya, seyogyanya para pengelola diarahkan pada ambisi melayani sampai dapat menyaingi para tengkulak atau rentenir. Sampai sekarang tampaknya rakyat masih suka menjual produksinya kepada tengkulak meskipun dengan harga lebih rendah dan mau meminjam uang pada rentenir meskipun dengan bunga tinggi. Ini disebabkan tengkulak atau rentenir bersedia mendatangi rumah-rumah penduduk walaupun perhubungan sulit, tidak dengan macam-macam persyaratan, dan pokoknya merakyat secara luwes. Mereka tidak birokratis dan tidak keberatan bekerja bagaikan tanpa batas waktu (buka 24 jam). Maka jika pengelola koperasi berambisi memajukan koperasi, mereka tidak boleh kalah baiknya daripada tengkulak atau rentenir dalam melayani anggota atau langganan.

### **Pendayagunaan Pengawasan Intern dan Ekstern**

Sudah pasti berbagai kesemrawutan, salah urus, penyelewengan, atau kelalaian akan sangat merintangki kelangsungan hidup dan perkembangan usaha koperasi. Sebab itu untuk mengembangkan koperasi dituntut berfungsinya faktor pengawasan: di samping untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, juga untuk memperbaiki ketidakberesan yang telah ada. Supaya pengawasan dirasakan lebih positif, hendaknya ia mengemukakan perluasan cakrawala pemikiran sampai memberikan alternatif dan memperdalam kesadaran serta tanggung jawab pada mereka yang diawasi. Fungsi pengawasan demikian ini akan efektif, bila dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, misalnya sebulan sekali atau setidak-tidaknya tiga bulan sekali.

Mekanisme pengawasan dalam koperasi kita pada dasarnya dilakukan secara intern dan ekstern. Pengawasan intern dijalankan oleh para anggota koperasi dan khususnya dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan koperasi. Sedangkan pengawasan ekstern berasal dari luar unit koperasi itu, yang khususnya dilakukan oleh instansi Departemen Koperasi setempat. Belum berfungsinya pengawasan intern koperasi secara efektif perlu ditingkatkan atau diperkuat oleh perhatian dari pengawasan ekstern. Konkritnya pembinaan yang betul-betul dari para pejabat instansi koperasi, pertanian, perindustrian, perbankan, dan lain-lain instansi pemerintah yang menurut GBHN harus mendahulukan pembangunan ekonomi masyarakat; supaya dari terbangunnya ekonomi rakyat akan meningkatlah kemampuannya untuk membangun semua bidang non-ekonomi. Dengan terselenggaranya pengawasan ekstern bekerjasama dengan pengawasan intern koperasi, maka dapat semakin diaktifkan berlangsungnya pengawasan intern dan partisipasi dari anggota koperasi untuk terus-menerus memajukan koperasinya.

Maka sungguh tepatlah diadakannya kerjasama pembinaan koperasi di antara Departemen Koperasi, Kejaksaan Agung, dan Kapolri akhir-akhir ini.<sup>1</sup> Namun kerjasama ini baru akan bermanfaat untuk pembangunan koperasi, apabila betul-betul dilaksanakan pada jajaran instansi yang terbawah yaitu sampai menjangkau setiap unit koperasi primer. Dalam rangka pembinaan unit-unit koperasi, maka peranan polisi dan jaksa yang masuk desa dapat difungsikan untuk menyuluhkan semangat hukum dan mentalitas kedisiplinan pada orang-orang koperasi. Untuk itu jaksa dan polisi ini hendaknya peka terhadap ketidakberesan yang menghambat pertumbuhan koperasi dan cepat tanggap untuk perbaikan-perbaikan yang semestinya dilakukan. Suasana kehadiran mereka yang senantiasa dekat dengan program pengembangan koperasi-koperasi primer itu bisa memberikan suasana takut dan malu untuk menyalahgunakan wewenang atau melalaikan disiplin organisasi.

### **Penciptaan Iklim yang Membantu**

Pembangunan perkoperasian dari kondisi yang sangat lemah sudah sewajarnya membutuhkan perlindungan dan bimbingan yang secukupnya khususnya dari pemerintah. Hal ini terutama karena masyarakat ekonomi lemah yaitu anggota koperasi baru mulai belajar dalam berbagai segi mengembangkan suatu usaha yang dapat menyejahterakan anggotanya secara memadai. Padahal pemerintah kita sebagai penyelenggara pembangunan nasional berkewajiban untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan memprioritaskan fasilitas-fasilitas khusus demi menciptakan keadilan sosial yang diamanatkan ideologi dan konstitusi negara. Jelaslah tanpa campur tangan pemerintah maka koperasi yang masih lemah akan sulit hidup dan berkembang di tengah kekuatan-kekuatan ekonomi lain yang sama-sama memperebutkan hasil-hasil pembangunan.

Amanat konstitusi adalah untuk membangun perkoperasian sehingga menjadi soko guru ekonomi nasional. Karena itu menjadi tugas pemerintah untuk membangun koperasi dalam arti: mendirikan, menyuluhkan, memantapkan, dan memperbanyakkannya. Sudah tentu berbagai kebijakan dan fasilitas khusus itu diadakan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi dan bukan untuk memanjakannya yang membuat koperasi tetap lemah tidak mempunyai kekuatan. Tugas pembinaan koperasi pada khususnya dilaksanakan oleh birokrasi Departemen Koperasi dari pusat sampai instansi terbawah di seluruh penjuru tanah air. Tetapi jika koperasi telah mampu mandiri berkembang sendiri, campur tangan pemerintah hendaknya ditujukan pada koperasi-koperasi yang lebih membutuhkan pembinaan.

<sup>1</sup>Harian *Suara Karya*, 8 Juli 1983.

Tugas membina koperasi akan lebih berhasil, apabila instansi koperasi bekerjasama terpadu dengan instansi pemerintah yang lain (misalnya instansi pertanian, perindustrian) atau lembaga swasta yang berkepentingan. Agar instansi-instansi koperasi itu betul-betul membina perkembangan koperasi di wilayahnya, memang dibutuhkan kontrol dan evaluasi periodik oleh instansi koperasi atasannya atau oleh lembaga perwakilan rakyat setempat dan pers/mass-media. Karena bidang ekonomi merupakan ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, maka semua pihak perlu menyadari pentingnya membantu pengembangan koperasi ini. Mengingat koperasi sudah diyakini sebagai konsep dan strategi yang sebaik-baiknya, maka jika koperasi kurang berhasil meningkatkan kesejahteraan berarti orang-orang pelaksanaannya yang belum baik: apakah itu para pengelola koperasi atau pembina koperasi dari instansi pemerintah. Mereka inilah yang harus ditingkatkan atau dibenahi secara tuntas.

#### **Pemupukan Modal yang Terus-menerus**

★ Pemupukan modal memang terutama didasarkan pada pengumpulan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Maka supaya terhimpun modal yang sebesar-besarnya, sewajarnya jika ada rangsangan/imbalan tertentu bagi anggota yang melakukan simpanan besar, misalnya berupa prioritas dalam pelayanan dan hak. Kemudian dari sisa hasil usaha setiap tahunnya pun dapat diharapkan peningkatan modal lagi. Dengan telah dibentuknya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) sekarang ini, telah tersedia sumber dana atau permodalan baru untuk pengembangan usaha koperasi dan tercipta wadah tempat menabung untuk dana-dana yang berlebihan dari unit-unit koperasi tertentu.

Pengumpulan modal yang terus-menerus ini adalah penting dalam rangka pembesaran atau perluasan usaha koperasi, supaya koperasi berdaya mampu semakin meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat. Modal ini pun bermanfaat sebagai dana untuk pembelian produksi dari anggotanya. Sebab sering terjadi karena tiadanya dana atau terlambat/belum cairnya kredit dari pemerintah menyebabkan para petani menjual hasilnya kepada tengkulak. Sebagai contoh diberitakan bahwa sampai kini para petani di beberapa kecamatan di Bojonegoro, Jawa Timur, menjual gabahnya kepada tengkulak dengan harga Rp 80,00 - Rp 95,00 per kg. Baru kemudian tengkulak nanti menjualnya kepada KUD dengan harga pemerintah Rp 145,00 per kg, setelah kredit pemerintah untuk KUD cair.<sup>1</sup> Dengan demikian koperasi tidak menyejahterakan para petani anggotanya melainkan menyejahterakan tengkulak.

<sup>1</sup>Harian *Merdeka*, 7 April 1983 dan *Sinar Harapan*, 21 Mei 1983.

### **Perluasan Usaha Setelah Koperasi Berkembang**

Perluasan usaha merupakan langkah yang perlu diambil setelah koperasi menghimpun modal yang besar. Apabila satu jenis usaha tertentu berhasil berkembang, sudah selayaknya koperasi diperluas dengan jenis usaha baru yang mempunyai prospek menggembirakan atau dengan jenis usaha yang bersifat menunjang ataupun melengkapi usaha semula. Misalnya koperasi produksi padi kemudian diperluas dengan pengembangan koperasi penggilingan beras atau koperasi budidaya jamur merang. Begitu pula dari koperasi peternakan sapi perah selanjutnya dilengkapi dengan pengembangan koperasi pembuatan keju dan mentega atau koperasi budidaya makanan ternak. Atau meningkatnya koperasi produksi diperluas dengan pendirian dan pengembangan koperasi simpan-pinjam.

Patut dimaklumi bahwa sebenarnya sangat banyak kemungkinan usaha industri hasil-hasil agraris yang bisa ditangani koperasi, seperti industri pengolahan buah-buahan, industri pengawetan ikan atau daging, industri minyak goreng dari biji-bijian, pembuatan tepung dari ubi-ubian, industri kosmetik/obat tradisional, dan pelistrikan pedesaan yang mendukung industri pedesaan. Niscaya industrialisasi bermacam-macam hasil agraris akan secara langsung mendorong berkembangnya pertanian, peternakan, perikanan, usaha pekarangan yang berarti meningkatkan pendapatan kaum petani. Apabila suatu jenis usaha industri ternyata membutuhkan pengelolaan dan dana yang sangat besar, maka sewajarnya ditangani oleh Puskud (Pusat KUD) di propinsi-propinsi dengan permodalan dari Bukopin. Misalnya dalam mengusahakan industri pabrik susu, pengolahan kulit, dan jasa angkutan umum propinsi.

### **Kemampuan Bekerjasama dengan Sektor Usaha yang Lain**

Sebagai badan usaha yang mengambil bagian dalam perekonomian masyarakat/nasional bagaimanapun koperasi berhubungan dengan kekuatan ekonomi yang lain yaitu perusahaan negara atau perusahaan swasta. Apalagi kemajuan koperasi sendiri, mau tak mau diperlukan kerjasama usaha dengan kekuatan-kekuatan ekonomi lain itu. Supaya kerjasama ini sebesar mungkin menguntungkan koperasi, sudah pasti koperasi harus profesional dan mempunyai daya menawar yang kuat. Karena apabila tidak, niscaya koperasi hanya akan disepelekan atau dipermainkan. Sebab itu, di sinilah terasa pentingnya pelaksanaan pembinaan seperti yang diuraikan di atas. Pada khususnya dalam kerjasama usaha ini kekuatan ekonomi di luar koperasi akan mempersyaratkan koperasi dapat dipercaya dan tidak kalah efisien dalam usaha dibandingkan dengan mereka.

Bangun usaha koperasi yang secara hakiki merupakan badan usaha yang bercorak kerjasama ekonomi sudah seharusnya mengembangkan semangat

kerjasama atau kegotongroyongan di antara seluruh anggotanya sendiri. Hanya kalau kerjasama ini betul-betul sudah berlangsung di dalam usaha ekonomi koperasi sendiri, maka koperasi akan berkemampuan menciptakan suasana kerjasama dengan kekuatan ekonomi lain dalam masyarakat. Walaupun perlu bekerjasama dengan kekuatan lain, namun demikian koperasi terlebih-lebih perlu bekerjasama dengan sesama koperasi sendiri. Kerjasama dengan koperasi lain ini di samping untuk saling mengembangkan koperasi-koperasi yang sama-sama badan ekonomi yang berwatak sosial juga untuk melatih koperasi-koperasi agar semakin mampu bekerjasama dengan kekuatan ekonomi di luar koperasi.

Meskipun berwatak sosial, koperasi sebagai badan ekonomi tidak boleh melalaikan corak ekonominya yaitu mencari keuntungan, pandai-pandai menampilkan bonafiditas, dan berusaha meningkatkan kualitas pada khususnya dalam bekerjasama dengan kekuatan lain. Apabila mengabaikan hal ini, pasti koperasi akan lemah daya saingnya. Maka itu penting menjadi kebiasaan pengelola koperasi untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berkoperasi dari para anggotanya, yaitu secara konkrit untuk senantiasa menyempurnakan mutu hasil-hasil koperasi mereka. Bila saja hasil-hasil koperasi terjamin mutunya dan terjaga bonafiditas koperasi, tentulah koperasi disegani dan mendapatkan kerjasama usaha yang semakin besar dari kekuatan ekonomi lain.

### Sebagai Gagasan Rangkuman

Pembinaan berbagai hal tadi secara serius dan berkesinambungan menjadi syarat mutlak untuk memantapkan kehidupan dan pertumbuhan koperasi di pedesaan, supaya koperasi berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Unit-unit koperasi desa yang paling berhasil hendaknya dijadikan percontohan untuk pengembangan koperasi desa yang lain atau berikutnya. Apabila sudah terbangun sejumlah besar koperasi yang berhasil, perlulah dilaksanakan saling kerjasama di antara semua koperasi di daerah itu demi menciptakan kondisi penggalakan dan kegairahan perkembangan koperasi-koperasi khususnya bagi koperasi yang masih belum berhasil.

### CATATAN AKHIR

Kerjasama ekonomi memang seharusnya menjadi corak kehidupan bentuk usaha koperasi, pada khususnya kerjasama atau gotong-royong di antara seluruh anggota koperasi sendiri. Apabila kerjasama ini terus-menerus digiatkan di dalam usaha intern koperasi primer, maka ada landasan kuat koperasi

ini mempunyai kemampuan kerjasama (ekstern) dengan koperasi primer lain dan dengan kekuatan ekonomi yang lain. Dengan terbangunnya suasana kerjasama di antara sejumlah besar koperasi yang berhasil (juga dari koperasi yang belum berhasil), niscaya perkoperasian akan berkembang semakin pesat dan tangguh dan mempunyai kemampuan lebih besar untuk bekerjasama dengan kekuatan ekonomi yang lain. Secara ini perkoperasian menjadi jaringan ekonomi yang benar-benar bisa diandalkan untuk menumbuhkan secara mantap tiap-tiap koperasi primer yang ada dan meluaskan koperasi ke segala wilayah dan sektor.

Jika kerjasama ekonomi baik di dalam koperasi sendiri maupun dengan kekuatan ekonomi lain sudah semakin terlaksana, barulah perkoperasian kita menjadi mekanisme keadilan sosial di dalam masyarakat. Dari terbinanya jaringan ekonomi perkoperasian secara terus-menerus, tentu mudahlah untuk meningkatkan peranan koperasi di negara kita menyamai peranan besar perkoperasian di negara maju seperti negara-negara Skandinavia. Andaikata sampai terwujud jaringan ekonomi perkoperasian integral secara nasional, akan terbangunlah strategi efektif atau kekuatan besar untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat lemah serta pemerataan perekonomian bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka pembangunan perkoperasian sekarang, khususnya koperasi-koperasi di pedesaan, perlu digarisbawahi pernyataan Presiden Soeharto pada hari ulang tahun koperasi yang lalu: "Saya minta agar semua gubernur, bupati, camat, dan kepala desa/lurah benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh perkembangan koperasi di daerahnya masing-masing."<sup>1</sup> Sudah barang tentu seluruh pejabat pemerintahan ini merupakan pemegang kunci digiatkannya pembangunan masyarakat Pancasila, pada khususnya masyarakat yang berkeadilan sosial. Dengan memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan koperasi di daerahnya masing-masing, maka mereka tidak lagi membuat sila "keadilan sosial" hanya sekedar anjuran moral saja melainkan menjadikannya mekanisme pengamalan.

<sup>1</sup>Harian Sinar Harapan, 12 Juli 1984.